

**STRATEGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK PADA PILKADA
SERENTAK KABUPATEN SLEMAN 2015**

Oleh : Cipta Rosli dan Halili M.A. / Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

ciptarosli@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melaksanakan pendidikan politik pada Pilkada Serentak Kabupaten Sleman 2015 dan 2) hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada Serentak Kabupaten Sleman 2015.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek Penelitian ini terdiri dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman, Ketua Bidang Perkaderan dan Pendidikan, dan kader yang pernah mengikuti pendidikan politik di PDIP Sleman. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan wawancara mendalam. Adapun teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan melakukan reduksi data, kategorisasi, *display*/penyajian, dan pengambilan kesimpulan. Dalam menjamin keabsahan data digunakan teknik *cross check*. Peneliti melakukan *cross check* dari data yang didapat melalui wawancara pada subjek-subjek penelitian dan dokumentasi yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang ada di PDIP terdiri atas tiga jenjang, yaitu tingkat pratama, madya dan lanjut. Materi yang disampaikan dalam pendidikan politik kader yaitu meliputi enam materi wajib. Metode pelaksanaan pendidikan politik bagi kader dan non kader dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas dalam bentuk langsung hidup di tengah-tengah masyarakat. PDIP menggunakan semua instrumen yang memungkinkan dapat memenangkan kandidat yang diusung yaitu dengan kombinasi sosialisasi ke dalam, sosialisasi keluar serta konsolidasi dan komunikasi politik. Strategi *public relation politic*, kampanye dan lobi politik digunakan PDIP untuk melaksanakan pendidikan politik. Adapun kendala yang dihadapi oleh PDIP dalam menjalankan pendidikan politik sehingga membuat kandidat bupati yang didusung oleh PDIP pada Pilkada Kabupaten Sleman karena penerimaan masyarakat terhadap calon pemimpin perempuan belum baik. Masyarakat kabupaten Sleman menganggap bahwa perempuan masih belum pantas untuk menjadi pemimpin. Faktor penetapan kandidat yang dilakukan oleh DPP tanpa mempertimbangkan secara matang aspirasi dari bawah.

Kata kunci: *strategi partai, pendidikan politik, pilkada*

**STRATEGY IN IMPLEMENTING EDUCATION POLITICS PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ON SIMULTANEOUSLY
ELECTION DISTRICT SLEMAN 2015**

by: Cipta Rosli and Halili M.A. / Civic Education and law,
Faculty Social Sciences
Yogyakarta State University

ciptarosli@yahoo.com

ABSTRACT

This research aimed to describe: 1) strategy of the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan in conducting political education in the elections Simultaneously Sleman 2015 and 2) barriers and support in the implementation of political education by the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan in the elections Simultaneously Sleman Regency, 2015.

This research is a descriptive, qualitative approach. The research subject was determined by purposive technique. Subjects The study consists of the Chairman of the DPC PDIP Sleman, Chairman of Politic Education, and the cadres who had attended political PDIP Sleman. Collecting data in this study by documentation and interview. The technique in analyzing the data in this study to perform data reduction, categorization, display / presentation, and conclusions. In order to guarantee the validity of the data used technique cross check. Researchers conducted a cross check of the data obtained through interviews on the subjects of research and documentation is obtained.

The results showed that political education is in PDIP consists of three levels, namely pratama level, intermediate and advanced. Material presented in the political education of cadres which includes six compulsory subject. The method of implementation of political education for cadres and non-cadres carried out in the classroom and outside the classroom in the form of live life in the midst of society. PDIP use all the instruments that allow the candidates can win that carried that with a combination of socialization into socialization out as well as consolidation and political communication. Public relations strategies politics, campaigns and political lobbying PDIP used to carry out political education. The constraints faced by the PDIP in carrying out political education so as to make the regent candidate in the elections didiusung by PDIP Sleman for public acceptance of female leadership candidates have not been good. Sleman district community considers that women still do not deserve to be a leader. Factors determination made by the DPP candidate without thinking twice aspiration from below.

Keywords: *party strategy, political education, election*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam negara demokrasi. Mengutip Golden, Firmanzah mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi (Firmanzah, 2008: 125). Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang duduk di lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat seperti ini merupakan pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu mempengaruhi demokrasi. Semakin banyak pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, maka semakin baik pula kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, penting untuk diupayakan agar pemilih datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Salah satu ukuran kesuksesan suatu Pilkada diukur dari seberapa besar jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara. Hal tersebut disebabkan karena pemilu merupakan ajang pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin.

Oleh karena itu, memilih figur pemimpin negara ataupun daerah secara langsung merupakan momentum yang sangat krusial bagi suatu negara untuk itu harus disertai dengan pemahaman terhadap warga negara mengenai arti penting politik. Dalam hal ini maka dibutuhkan instrumen pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, dalam Pasal 11 Ayat (1) di sebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik yaitu sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas. Artinya partai politik bertanggung jawab dalam hal pendidikan politik dan harus secara konsisten menjalankan fungsi tersebut. Namun pada kenyataannya dilapangan partai politik belum sesuai, mereka gencar dalam melakukan fungsi pendidikan politik berdekatan dalam momentum pemilu sehingga berdampak pada pengetahuan warga negara

mengenai politik termasuk dalam pemilu yang kurang maksimal. Apabila suatu partai politik maksimal dalam memberikan pembelajaran politik bagi warga negara, maka warga negara tersebut akan memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam momentum pemilu. Oleh karena itu, instrumen pendidikan politik menjadi ajang untuk mempromosikan visi dan misi serta tujuan dan program-program partai politik. Apabila hal tersebut berjalan, maka partai politik akan dapat mempengaruhi pilihan pemilih untuk kepentingan partai politik tersebut.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi partai politik yaitu sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas ada salah satu partai yang telah melaksanakannya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terlihat dari banyak kader dan simpatisan PDIP sehingga membawa PDIP sebagai partai pemenang pada pemilu legislative dengan perolehan kursi terbanyak yang terpilih sebagai DPRD Kabupaten Sleman yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil meraih 12 (dua belas) kursi. Namun kemenangan itu tidak mampu mengantarkan calon kepala daerah yang

diusung oleh PDIP pada Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut dengan istilah Pilkada di Kabupaten Sleman 2015. Dalam Pilkada Serentak 2015 yang diikuti oleh PDIP di tiga kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak ada satupun yang berhasil memenangi pemilihan.

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik meneliti strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik pada Pilkada Serentak Kabupaten Sleman tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2016 sampai bulan Mei 2016. Penelitian tentang strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam melaksanakan pendidikan politik pada Pilkada Serentak Kabupaten Sleman tahun 2015 ini dilakukan di Kantor DPC PDIP Sleman dengan pertimbangan bahwa dalam memberikan pendidikan politik, DPC menjadi lokomotifnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam buku Moleong (2011: 4) Bogdan dan Taylor berpendapat

bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berguna menjelaskan dan memberikan gambaran tentang fenomena sosial yang akan diteliti secara mendalam. Pendekatan kualitatif juga bisa disebut penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011: 4).

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah pemilihan subjek penelitian yang mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Lexy J.Moleong, 2011: 224). Dalam penelitian mengenai strategi PDIP dalam melaksanakan pendidikan politik pada Pilkada Serentak Kabupaten Sleman 2015 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi tersebut, subjek yang dianggap memenuhi kriteria serta potensial untuk digali sebagai sumber data yaitu Ketua

DPC PDIP Kabupaten Sleman, Ketua Bidang Perkaderan dan Pendidikan, dan kader PDIP Sleman.

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai cara untuk pengumpulan data. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J.Moleong, 2011: 186). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang menunjang dalam melihat strategi PDIP dalam melaksanakan pendidikan politik pada Pilkada serentak Kabupaten Sleman tahun 2015 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi tersebut. Dokumen dalam penelitian ini yang dimaksud adalah berupa file-file kegiatan PDIP Sleman yang meliputi jadwal kampanye, jadwal roadshow, jadwal deklarasi pasangan calon bupati dan foto-foto proses kegiatan pendidikan politik kader PDIP Sleman.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan melakukan *cross check* data.

Teknik *cross check* digunakan dalam penelitian ini karena penelitian menggunakan teknik pengumpulan data ganda pada objek penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi (Burhan Bungin, 2001: 95-96).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data non statistik atau bisa disebut juga dengan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2011: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan selanjutnya menarik kesimpulan-kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan wawancara terhadap para narasumber, diperoleh data sebagai berikut:

Partai politik yang salah satu fungsinya memberikan pendidikan politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, dalam penyusunan program kerja harus memasukkan materi pendidikan politik di dalamnya baik pendidikan politik bagi kader maupun masyarakat. Pendidikan politik harus didasarkan pada rumusan pasal dalam ketentuan undang-undang tersebut, sehingga amanat yang terkandung di dalamnya dapat terlaksana dengan baik.

Partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik yang diberikan kepada kader atau anggota partai dan pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 11 ayat (1) mengatur ketentuan dari fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik terutama bagi anggota atau kadernya maupun pemilih, dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDIP tidak dijelaskan secara tegas mengenai pendidikan politik. Akan tetapi dari beberapa pasal dalam Anggaran Dasar tersirat mengenai pelaksanaan pendidikan politik, hal ini dapat dilihat adanya pengaturan tentang masalah keanggotaan partai, yang kemudian ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam melaksanakan amanat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu adanya program kerja yang bersifat teknis yaitu program kerja yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktifitas politik partai.

Program kerja PDIP yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kader atau anggota dimulai dari struktur organisasi terendah yaitu tingkat ranting sampai pada tingkat pusat serta pendidikan politik bagi

masyarakat yang belum menjadi anggota atau kader partai. Program kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik di DPD PDIP Kabupaten Sleman meliputi berbagai kegiatan antara lain dibidang kaderisasi, pembangunan kemasyarakatan, dan kebijakan publik.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDIP Kabupaten Sleman yaitu pendidikan politik terhadap anggota atau kader partai dan pendidikan politik terhadap pemilih. Pelaksanaan pendidikan politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk secara khusus meningkatkan kualitas kader partainya dan secara umum meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dari program kerja yang ditetapkan DPD PDIP Kabupaten Sleman dapat dinyatakan bahwa PDIP sebagai partai politik yang menamakan dirinya sebagai partai wong cilik, partai ini dalam kebijakannya secara serius melakukan advokasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil (wong cilik) melalui perjuangan dalam berbagai bidang kehidupan, di samping tetap memberikan perhatian yang sangat serius pada masalah pengkaderan.

Dari sudut pandang PDIP masalah pengkaderan diklasifikasi ke dalam dua persoalan yaitu pembinaan kader yang sudah menjadi anggota partai serta perluasan jumlah kader melalui berbagai cara, metode dan strategi yang dimiliki oleh PDIP Kabupaten Sleman. Pelaksanaan Pendidikan politik bagi kader Partai PDIP serta pemilihan dilakukan dengan berbagai cara, metode serta strategi antara lain melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi, kegiatan sosial dan lainnya yang secara rutin dilakukan pada tingkatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRa).

Kegiatan pendidikan politik PDIP tidak hanya selalu bermuatan politik akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi sosial kemasyarakatan serta strategi kebudayaan yang tidak terlepas dari ciri PDIP sebagai partai yang lahir dari semangat perjuangan oleh orang kecil. Pendidikan politik oleh DPD PDIP Kabupaten Sleman tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kadernya saja namun juga sebagai upaya tanggung jawab partai politik untuk ikut

memberikan pemahaman dan penyadaran masyarakat akan politik.

Dilihat dari karakteristik Partai PDIP dalam melaksanakan pendidikan politik, dapat dikatakan bahwa PDIP sebagai partai kader. Partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi anggota dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Definisi mengenai partai kader sangat tepat bagi PDIP karena ciri partai kader hampir ada dalam partai ini serta dalam menjalankan kegiatan kepartaian PDIP tidak mengandalkan satu atau beberapa tokoh partai dalam mengembangkan partai namun semua keberhasilan partai merupakan hasil kerja keras para kader PDIP.

Dalam hal strategi yang dilakukan oleh PDIP dalam melaksanakan pendidikan politik pada konteks Pilkada Serentak Kabupaten Sleman 2015 apabila dikaitkan dengan teori dari

strategi pendidikan politik maka didapatkan beberapa kesesuaian yaitu PDIP menggunakan strategi *public relation politic* yang mana strategi ini tercermin dengan adanya upaya PDIP untuk membentuk kader yang kuat melalui pendidikan politik berjenjang serta komunikasi yang dijalin mulai anak ranting hingga DPC yang bertujuan untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, profesional atau aktivis (komunikator) dan khalayak (kader, simpatisan, masyarakat umum). Selain itu strategi berupa kampanye politik juga dilakukan oleh PDIP yang terwujud dalam kegiatan deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta gerakan berupa kampanye terbuka dan *roadshow* dari kecamatan-kecamatan sekabupaten Sleman untuk memperkenalkan pasangan calon hal itu merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan PDIP untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Strategi lobi politik juga tak lupa digunakan oleh PDIP dalam melaksanakan pendidikan politik pada Pilkada Serentak Kabupaten Sleman 2015 sebab ini menjadi gelanggang terpenting bagi pembicaraan para

politikus atau kader politik tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan konsensus. Terbukti dengan komunikasi yang dijalin oleh PDIP dengan partai lain yang terwujud dengan digandengnya calon wakil bupati dari partai Gerindra serta komunikasi dan konsolidasi antar pengurus partai baik internal dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas maupun dengan pengurus partai lain demi tercapainya tujuan.

Proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PDIP Kabupaten Sleman tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan partai dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan adanya kendala-kendala sehingga membuat hasilnya kurang maksimal. Kendala tersebut antara lain karena adanya pandangan yang negatif terhadap kandidat pemimpin perempuan dan minimnya persiapan untuk melakukan sosialisasi ke bawah. Pandangan pragmatis masyarakat bahwa pemimpin perempuan itu kurang baik. Masyarakat Sleman sebagai masyarakat tradisional masih menyimpan keyakinan bahwa kandidat pemimpin perempuan masih belum layak, sehingga dalam pencalonan Yuni-Danang kurang mampu

mendulang suara mengalahkan pasangan Sri Purnomo-Muslimatun. Kendala lain yang berasal dari dalam internal partai yaitu adanya komunikasi yang tidak terjalin antara DPC dengan DPP terkait dengan penetapan kandidat yang diusung oleh PDIP. Dalam menentukan calon Bupati, DPP terkesan mau menang sendiri dengan tidak mempertimbangkan masukan dan realitas yang ada di bawah. Selain itu, komunikasi DPC, PAC, dan pengurus Ranting yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pengurus pada tingkat ranting atau desa yang tidak aktif sehingga ketika diadakannya pendidikan politik di DPC ataupun Cabang tidak dapat berpartisipasi. Sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik. Akan tetapi faktor pendukung dari pendidikan politik yang dilakukan oleh PDIP dalam Pilkada Kabupaten Sleman adalah banyaknya kader PDIP sehingga memudahkan untuk menyatukan persepsi terkait dengan kemenangan calon. Selain itu, kader yang telah dididik relatif memiliki pemahaman teknis dalam

memenangkan kandidat bupati-wakil bupati.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat penulis simpulkan bahwa strategi PDIP dalam pendidikan politik dalam Pilkada Serentak tahun 2015 Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Strategi PDIP dalam pendidikan politik dalam Pilkada Serentak tahun 2015 Kabupaten Sleman dijalankan oleh DPC PDIP Kabupaten Sleman yang ditujukan kepada kader dan masyarakat umum. Pendidikan politik yang ada di PDIP terdiri atas tiga jenjang, yaitu tingkat pertama, madya dan lanjut. Materi yang disampaikan dalam pendidikan politik kader yaitu meliputi enam materi wajib di antaranya adalah ideologi partai, pemahaman pancasila, dan lain-lain. Metode pelaksanaan pendidikan politik bagi kader dan non kader dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas

dalam bentuk langsung *live-in* (hidup) di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah membentuk kader yang memahami persoalan dari masyarakat secara langsung. Sementara itu, dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2015, pendidikan kader secara langsung diarahkan untuk memenangkan pasangan calon bupati-wakil bupati yang diusung oleh PDIP yaitu Yuni-Danang. Dalam hal ini, PDIP menggunakan semua instrumen yang memungkinkan dapat memenangkan kandidat yang diusung yaitu dengan kombinasi sosialisasi ke dalam, sosialisasi keluar serta konsolidasi dan komunikasi politik di tingkatan partai serta ke masyarakat secara langsung. Strategi *public relation politic* yang mana strategi ini tercermin dengan adanya upaya PDIP untuk membentuk kader yang kuat melalui pendidikan politik berjenjang serta komunikasi yang dijalin mulai anak

ranting hingga DPC. Strategi berupa kampanye politik juga dilakukan oleh PDIP yang terwujud dalam kegiatan deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta gerakan gerakan berupa kampanye terbuka dan *roadshow*. Strategi lobi politik juga tak lupa digunakan oleh PDIP dalam melaksanakan pendidikan politik pada pilkada serentak 2015. Walaupun hasilnya pasangan yang diusung PDIP-Gerindra dinyatakan kalah, akan tetapi pendidikan politik yang dijalankan oleh PDIP telah maksimal. Akan tetapi terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kekalahan tersebut.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh PDIP dalam menjalankan pendidikan politik karena penerimaan masyarakat terhadap calon pemimpin perempuan belum baik. Masyarakat kabupaten Sleman menganggap bahwa perempuan masih belum pantas untuk menjadi

pemimpin. Selain itu, faktor penetapan kandidat yang dilakukan oleh DPP tanpa mempertimbangkan secara matang aspirasi dari bawah. Seperti diketahui bahwa penetapan Yuni untuk mewakili PDIP pada perhelatan pemilihan Bupati Sleman menjadi prerogative DPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya adalah masukan dari bawah dan penerimaan masyarakat terhadap calon. Akan tetapi dalam menetapkan pasangan Yuni-Danang, DPP PDIP kurang mempertimbangkan realitas massa yang ada di bawah. Sehingga calon yang diusung oleh PDIP kalah dari calon yang diusung oleh PAN yaitu Sri Purnomo-Muslimatun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dikemukakan penulis:

1. Kepada DPC PDIP, dalam melakukan pendidikan politik

tidak hanya dilakukan ketika ada hajatan pemilu, akan tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai fungsi yang melekat pada Partai Politik. DPC sebagai candra dimuka harus mengikuti perkembangan masyarakat yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, pendidikan politik selain pengenalan partai dan sekian turunannya, juga memberi bekal kepada kader mengenai kondisi masyarakat secara makro dan mikro.

2. Kepada masyarakat umum, agar lebih terlibat dalam kegiatan politik sebagai bagian dari hak politik warga negara yang harus dijalankan. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan politik merupakan tawaran yang mesti diapresiasi.
3. Kepada para peneliti lain, penelitian ini masih sangat spesifik terkait dengan pendidikan politik oleh PDIP pada ajang menghadapi Pilkada Serentak tahun 2015 di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, peneliti lain bisa melanjutkan penelitian dengan mengambil aspek lain misalnya

pendidikan politik dalam membentuk kader militan dan lain sebagainya. Sehingga terpotret peran partai politik dalam hal ini PDIP di dalam menjalankan fungsi sebagai pendidikan kewarganegaraan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

DPP PDIP. *AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Perkasa.